



Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Surulangun Pasca Menjadi Ibukota *Onder Adeling* Rawas Tahun 1901-1942

Agus Susilo, Sarkowi

Agussusilo594@yahoo.co.id

STKIP PGRI Lubuklinggau

Abstrac

The event of the conquest of the Palembang Sultanate from the Dutch Colonial nation became a major event. As a large Islamic Sultanate in the archipelago until finally after going through several phases of war must be subdued and accept the defeat agreement from the Netherlands. After mastering the Palembang Darussalam Sultanate, the Dutch Colonial government changed the order of the Sultanate's administration into an Palembang Residency. Of course the status change also affects the area below. This was done by the Dutch colonial government in an effort to regulate a democratic government system in order to support its policies. The Surulangun Rawas area is an area that previously belonged to the Palembang Sultanate, but after coming to power the Dutch Colonial government raised the status of Surulangun Rawas to become the capital of Onder Adeling Rawas. Surulangun became the capital of Onder Adeling Rawas making this area more lively and crowded, because it became the center of the Dutch Colonial government. In the social environment there are many newcomers to this area, not only the Colonial community, but also residents from other regions outside the Surulangun Rawas area. Then pluralism appears in this region. From an economic standpoint, after Surulangun became the capital of Onder Afdeling Rawas, many people were introduced to various new agricultural systems. Many new plants such as rubber, oil palm began to be planted by the people of Surulangun as supporting the export life of the Dutch Colonial government. In the trading system it was also more alive, where the Rawas river was traversed and visited by traders from various regions around Rawas and beyond Rawas.

Keywords: *Social-Economic, Surulangun, Onder Afdeling*

Abstrak

Peristiwa takluknya Kesultanan Palembang dari bangsa Kolonial Belanda menjadi peristiwa yang besar. Sebagai Kesultanan Islam yang besar di Nusantara sampai akhirnya setelah melewati beberapa fase peperangan harus takluk dan menerima perjanjian kalah dari Belanda. Setelah menguasai Kesultanan Palembang Darussalam, pemerintah Kolonial Belanda merubah tatanan pemerintahan Kesultanan menjadi sebuah Karesidenan Palembang. Tentunya perubahan status tersebut juga berpengaruh terhadap daerah dibawahnya. Hal ini pemerintah Kolonial Belanda lakukan dalam upaya mengatur sistem pemerintahan yang demokratis dalam rangka mendukung kebijakannya. Daerah Surulangun Rawas merupakan sebuah daerah

yang sebelumnya milik Kesultanan Palembang, namun setelah berkuasa pemerintah Kolonial Belanda menaikkan status Surulangun Rawas menjadi ibukota Onder Adeling Rawas. Surulangun menjadi ibukota Onder Adeling Rawas membuat daerah ini menjadi lebih hidup dan ramai, karena menjadi pusat pemerintahan Kolonial Belanda. Dalam lingkungan sosial kemasyarakatan timbul banyak para pendatang baru ke wilayah ini, bukan hanya masyarakat Kolonial saja, namun juga penduduk dari daerah lain di luar daerah Surulangun Rawas. Maka kemajemukan muncul di wilayah ini. Dari segi ekonomi, pasca Surulangun menjadi ibukota Onder Adeling Rawas, masyarakat banyak dikenalkan dengan berbagai sistem pertanian yang baru. Banyak tanaman baru seperti karet, kelapa sawit mulai ditanam oleh masyarakat Surulangun sebagai penunjang kehidupan ekspor pemerintah Kolonial Belanda. Dalam sistem perdagangan juga lebih hidup, dimana sungai Rawas banyak dilalui dan disinggahi para pedagang dari berbagai wilayah di sekitar Rawas maupun luar Rawas.

Kata kunci: Sosial Ekonomi, Surulangun, Onder Adeling



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Sedangkan kata Koloni berarti daerah penempatan penduduk (KBBI, 2008). Kota Koloni adalah daerah yang merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk warga pendatang dari negara lain yang memiliki kesatuan dan berbeda dengan penduduk pribumi. Pada dasarnya Koloni adalah dimana tempat yang dikuasai oleh Negara lain beserta yang ada di dalamnya. Kota Koloni ini sifatnya menguasai dan menggunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia penduduk lokal sesuai kebutuhan dan peraturan dari negeri asal Koloni. Jadi meskipun Koloni ini datang ke wilayah Nusantara, mereka tetap menggunakan adat istiadatnya dan kesewenangan dalam hidup sehari-hari.

Kota Koloni ditandai dengan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung *societeit*, rumah ibadah *vrijmetselarij*. Rasanya inilah kesan pertama yang akan kita temukan jika membaca tulisan-tulisan sejarah berlatar belakang kota kolonial. Selain itu, kota-kota Karesidenan di zaman sebelum perang banyak menunjukkan aktivitas sosial dan kultur yang menandainya sebagai sebuah Kota Kolonial. Intinya bahwa kajian dalam kategori ini adalah memperkuat peran dan hegemoni pemerintah kolonial dalam berbagai bidang. Dalam kajian Kota Kolonial dalam pembangunannya sejak terbitnya Undang-Undang Desentralisasi dan berdirinya Gemeente pada tanggal 1 Juli 1917. Perhatian pemerintah Belanda dalam pembangunan Kota Koloni ini

meliputi penataan administrasi pemerintahan Kota, sistem perekonomian, perbankan, peternakan, serta keadaan sosial politiknya (Basundoro, 2012).

Pada tahun 1855, ditandai dengan munculnya pemukiman baru yang awalnya merupakan hutan belukar, berubah menjadi sebuah dusun kecil. Sejak tahun 1855 Surulangun menjadi daerah yang menjanjikan bagi perkembangan Kesultanan Palembang dengan memiliki wilayah yang sangat strategis berbatasan dengan beberapa wilayah penting seperti Jambi dan Bengkulu. Daerah Surulangun juga memiliki sumber daya alam yang melimpah menjadikan daerah ini menjadi perhatian pemerintah Kolonial Belanda setelah berkuasa atas Palembang. Perhatian pemerintah Kolonial Belanda sangat besar dalam wilayah ini, dengan menyusuri aliran Sungai Rawas, bangsa Belanda berusaha mencapai Surulangun. Keberadaan Belanda ke Surulangun tentunya supaya penguasa lokal dan masyarakat mengetahui bahwa Belanda sekarang berkuasa atas Kesultanan Palembang dan wilayah dibawahnya. Pada tahun 1929, wilayah Surulangun diperluas dengan cara membangun sarana dan prasarana yang dikembangkan di beberapa sektor dalam areal perencanaan tata kota persiapan untuk ibukota *Onder Afdeling* Rawas (Suwandi, 2010). Menurut Bapak Kasman (2019), yaitu :

Bangsa Belanda memasuki Surulangun setelah melalui perjalanan yang panjang dengan mengarungi sungai Rawas, akhirnya sampai juga pada wilayah Surulangun Rawas. Daerah ini sebelumnya merupakan sebuah dusun yang sepi dan tidak banyak pengunjung yang datang. Namun Belanda memiliki pendapat bahwa daerah ini akan menjadi daerah yang besar jika dikelola dengan baik. Dukungan sumber daya alam menjadi daya tarik sendiri, seperti pertanian dan perkebunan serta aliran sungai Rawas yang menjadi penggerak masyarakat Surulangun Rawas. Setelah melakukan penaklukan pada penguasa lokal, akhirnya bangsa Kolonial Belanda memasuki Surulangun Rawas dengan aman dan damai. Penguasa elit lokal juga menyambut Belanda dengan harapan membawa perubahan, maka segeralah tatanan wilayah dibuat. Sampai pada akhirnya Surulangun ditetapkan sebagai ibukota *Onder Afdeling* Rawas setelah melalui proses pertimbangan yang panjang.

Seorang pemimpin akan diakui sebagai pemimpin apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengerahkan bawahannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atas kebijakannya. Pada dasarnya pemerintahan Belanda terus berupaya untuk menjaga kestabilan sosial maupun ekonominya dalam memimpin. Pemerintahan Kolonial Belanda

banyak dibantu para pemimpin tradisional yang pro Belanda. Pemerintahan Kolonial Belanda berhasil menguasai Karesidenan Palembang dan terus memasuki wilayah-wilayah daerah pedalaman. Setelah berkuasa dan mengatur sistem perdagangan dan juga kehidupan sosial ekonomi, maka diharuskan kebijakan Belanda harus dijalankan meski terkadang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pribumi. Bangsa Kolonial Belanda menjalankan kepemimpinannya melalui *Conteleur* di wilayah *Onder Afdeling* Rawas berdasarkan peraturan yang menguntungkan pihak Belanda. Banyak tanaman baru yang ditanam berdasarkan harga pasaran internasional yang berlaku.

Kekuasaan potensial dalam realitas kehidupan sehari-hari dapat dilukiskan dengan adanya individu yang mempunyai sumber kekuasaan seperti kekayaan, informasi ataupun pengetahuan. Selama individu tersebut belum menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki, yang bersangkutan hanya dipandang memiliki kekuasaan potensial. Apabila individu tersebut kemudian menggunakan sumber-sumber kekuasaan tersebut dalam rangka kegiatan politik untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan memiliki kekuasaan aktual. Sebagai ilustrasi, individu tersebut dinyatakan memiliki kekuasaan aktual apabila ia menggunakan informasi dan pengetahuan yang dimiliki untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Apabila sumber kekuasaan tersebut kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka pemilik sumber kekuasaan dinyatakan aktual. Jadi sebuah kekuasaan selain dapat dilihat dari sisi jabatan yang ada pada dirinya dilekati sejumlah kewenangan, juga dapat dilihat dari sisi individu yang memangku jabatan, yaitu kualitas pribadi individu tersebut dalam menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan yang dipangkunya (Agustinus, 2016).

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode historis. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Sejarah, dimana peneliti mengumpulkan berbagai macam sumber-sumber yang mempunyai kaitan erat dengan obyek yang akan di teliti untuk merekonstruksi kembali peristiwa Sejarah masa lampau (Gottschalk, 2008).

Untuk mendapatkan data yang akurat dan empirik, maka digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Heuristik

Menurut Alian (2012), heuristik atau pengumpulan sumber merupakan tahap awal pada metode sejarah yang diarahkan pada kegiatan pencarian serta pengumpulan sumber sejarah sebanyak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pencarian dan pengumpulan sumber tersebut dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut:

2) Penelitian Lapangan

Sebagai salah satu penelitian primer dalam prosedur penelitian, dalam hal ini hanya menggunakan teknik wawancara sebagai sebuah wadah untuk mendapatkan informasi tentang obyek kajian. Wawancara yang dimaksud adalah mengadakan tanya jawab dengan informan maupun pelaku sejarah terkait.

3) Penelitian Pustaka

Sebagai salah satu kajian sejarah, tentunya diperlukan data-data dan informasi yang valid dan akurat. Sumber-sumber pustaka berupa buku-buku sejarah perjuangan bangsa, sejarah museum subkoss Garuda Sriwijaya di Lubuklinggau, Kekuasaan Elit Modern, laporan hasil penelitian, jurnal terbaik *Onder Afdeling*. Oleh karena itu, penulis juga dituntut untuk lebih selektif dalam memilih buku atau sumber-sumber pustaka lain untuk menghindari subyektifitasnya, atau data yang sifatnya merupakan argumentasi atau asumptif dan tidak didasari dengan sumber yang faktual.

4) Kritik

Pada tahapan ini, sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik, dilakukan penyaringan atau penyeleksian tentunya dengan mengacu pada prosedur yang ada, yaitu sumber yang faktual dan orisinalitasnya terjamin. Penelitian sejarah, kritik sumber terdiri dari dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Sedangkan kritik internal, yaitu menekankan pada aspek dalam seperti isi dari sumber kesaksian.

5) Interpretasi

Pada tahapan ini dituntut kehati-hatian dan integritas seorang penulis untuk menghindari interpretasi yang subyektif terhadap fakta. Hal ini dimaksudkan untuk memberi arti terhadap aspek yang diteliti, mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.

6) Historiografi

Historiografi, yakni penulisan atau perumusan fakta sejarah setelah interpretasi menjadi sebuah narasi sejarah.

Pembahasan

Pemerintahan Marga dipimpin oleh seorang Pesirah sebagai Kepala Marga, yang berfungsi sebagai Kepala Adat dan Kepala Pemerintahan. Setelah Kesultanan Palembang dikuasai Belanda dan berubah nama menjadi Karesidenan Palembang. Setelah Karesidenan Palembang dikuasai oleh Belanda, maka Kecamatan Rawas Ilir tunduk kepada pemerintahan Kolonial Belanda dan berada dibawah *Onder Afdeling* Rawas yang beribukota di Surulangun Rawas yang dipimpin oleh seorang Conteleur. Rawas Ilir menjadi pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang langsung tunduk dibawah pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Pada dasarnya kekuasaan Belanda bukan hanya berkuasa atas Karesidenan Palembang, namun juga daerah dibawahnya untuk menjaga kestabilan roda pemerintahan selama memimpin daerah jajahannya (“Karesidenan Palembang,” 2019).

Dalam kepemimpinan seorang *Conteleur* berusaha menjadi pemimpin yang tegas dan berpedoman dengan peraturan pemerintahan Kolonial Belanda. Seorang pemimpin adalah orang yang paling berperan dalam kepemimpinan kaitannya dengan wilayah kekuasaan. Dalam pemimpin sebuah *Onder Afdeling* Rawas, seorang *Conteleur* juga dibantu oleh para priyayi atau pemimpin lokal yang pro dengan Belanda. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, dan bahkan memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu. Untuk menunjang kepemimpinannya, seorang *Conteleur* dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik pribadi yang bersangkutan dan sasaran yang akan dipimpin. Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan partisipasi aktif dan keputusan penting berasal dari bawahannya. Pada dasarnya seorang *Conteleur* memberikan penilaian atas hasil kinerja bawahannya, memberikan kritik saat ada pekerjaan yang belum maksimal maupun pujian pada saat bawahannya mampu melaksanakan tugas dengan baik. Berdasarkan hasil pengamatan seorang *Conteleur* tersebut akan menjadi bahan laporan kepada pemerintahan Karesidenan di Palembang tentang bagaimana keadaan wilayah *Onder Afdeling* Rawas yang sedang dipimpinnya (Widianto, 2017).

Norma dan nilai menjadi pedoman dan petunjuk tingkah laku setiap komponen masyarakat dalam mencapai kepentingan, menjaga integritas atau

keutuhan masyarakat serta dijadikan alat pengendalian sosial. Komunikasi merupakan kunci terjadinya proses sosial. Proses sosial terjadi dalam kepentingan yang bersifat asosiatif yang disebut kerja sama (*cooperation*), dalam berbagai bentuk kerja sama yang disebabkan oleh adanya akomodasi-akomodasi dan asimilasi serta akulturasi. Proses kerja sama tersebut dibangun sejak usia masa kanak-kanak, baik dalam lingkungan keluarga dan kekerabatan maupun dalam lingkungan pergaulan di masyarakat. Komunikasi dalam hidup bermasyarakat ditandai dengan berbagai kerja sama yang saling menguntungkan antara Kolonial Belanda dengan pemimpin lokal. Hidup masa Kolonial Belanda didasarkan akan kepentingan penguasa Belanda demi kelancaran kekuasaannya. Proses sosial dilakukan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, meskipun biasanya terdapat faktor kompetisi, persaingan bahkan konflik di dalamnya, setidaknya kerja sama dapat dilakukan dengan cara: 1) *Bargaining*, 2) *Cooperation* / Kerja sama, 3) *Coalition* (Gabungan) (Andrik, 2015).

Untuk menjadi seorang *priyayi* atau elit tradisional yang maju seorang harus menempuh sebuah pendidikan agar nantinya dapat bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Pada masa kekuasaan Kolonial Belanda, identitas *priyayi* memiliki beberapa kode sosial yang membuat mereka dapat dikenal sebagai *priyayi*. Pertama adalah pendidikan dan pekerjaan. Para *priyayi* adalah lulusan Sekolah Belanda yang bekerja pada pemerintah Kolonial Hindia Belanda, tentu bukan hanya pekerjaan kasar, melainkan pekerjaan yang administratif atau fungsional. Kedua, *priyayi* memiliki kebudayaan yang khas, yang menunjukkan kelas mereka. Pada kenyataannya, *priyayi* di masa Kolonial Belanda memang memiliki pola rekreasi dan kegiatan yang secara sosial harus mereka lakukan, seperti menghadiri undangan-undangan pernikahan, khitanan atau tedak siten yang dilakukan komunikasi dan kelancaran tugas-tugasnya. Jadi, selain faktor pendidikan dan gaya hidup, ada pula sebuah norma yang harus ditunjukkan oleh *priyayi*, khususnya dari gaya bahasa dan tingkah laku. Gaya *priyayi* menunjukkan bahwa kelas mereka setara dengan gaya masyarakat Kolonial Belanda dan masyarakat Eropa di Hindia Belanda (Fanani, 2017).

Sejak tahun 1916 Kota-Kota yang telah ditetapkan sebagai *gemeente* belum memiliki kepala pemerintahan definitif atau wali kota. Kewenangan untuk mengurus *gemeente* pada saat itu masih dipegang oleh Asisten Residen. Pengangkatan wali kota atau *burgemeester* baru dapat dilakukan pada tahun 1916. Pada tahun 1922 dibentuk Dewan Pemerintahan Daerah atau *Gemeenteraad*. Lembaga tersebut kadang - kadang berperan mirip legislatif, karena merepresentasikan golongan etnis yang tinggal di Kota bersangkutan, tetapi kadang - kadang berperan sebagai organisasi eksekutif karena dipimpin

oleh *burgemeester*. Lembaga tersebut mutlak dibentuk karena Undang - Undang mensyaratkan bahwa *gemeente* harus bersifat kolegial yang dipimpin oleh *burgemeester*. Pemberian status otonomi kepada daerah-daerah jajahan di Sumatera khususnya wilayah *Onder Afdeling* Rawas merupakan pijakan yang kuat dalam rangka membangun kotanya. Namun demikian pemberian status tersebut masih terbatas pada kawasan yang dihuni oleh orang-orang Eropa beserta masyarakat yang diberi status sederajat.

Dalam pemukiman Kota Kolonial ditandai dengan adanya masyarakat yang majemuk. Penduduk asli dan pendatang tidak sama dalam berkembang dikarenakan kecerdasan dalam berpikir untuk hidup. Maka pemukiman perkotaan banyak ditemukan masyarakat yang hidup di bawah standar kelayakan. Hal ini terjadi karena pemukiman miskin di perkotaan secara umum akan menciptakan persebaran kemiskinan dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam, seperti sistem ekonomi perkotaan yang bersifat informal berskala kecil dalam bentuk pedagang asongan, pemulung, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Keberadaan sektor informal di kalangan masyarakat miskin perkotaan disebabkan karena rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang serta jumlah mereka juga tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, konflik yang menyangkut penggunaan suatu lokasi tertentu dapat timbul dengan mudah. Persaingan untuk mendapatkan ruang ini dianggap sebagai suatu perlombaan dan hadiahnya adalah ruang tersebut. Kelompok-kelompok yang paling strategis adalah yang paling berpengaruh, sedangkan sebagian besar anggota masyarakat yang lainnya harus menyesuaikan diri dengan keadaan supaya mereka dapat menemukan ruang (*niche*) untuk mereka (Basundoro, 2012).

Menurut Bapak Suwandi (2019), yaitu :

Dalam kehidupan di Surulangun setelah ditetapkan sebagai ibukota *Onder Afdeling* Rawas, sebuah daerah yang sebelumnya hanya hutan dan jarang penduduk menjadi sebuah perubahan yang baru. Sejak Belanda mampu menguasai Surulangun dan mengubahnya sebagai ibukota *Onder Afdeling* Rawas, kota kecil ini berkembang sangat pesat dan mampu bersaing dengan kota-kota lainnya. Sungai Rawas yang sebelumnya hanya sebagai jalur perdagangan air biasa dan tidak terlalu ramai menjadi lebih hidup dan muncullah tatanan kehidupan yang baru. Banyak pedagang luar tertarik berdagang dengan masyarakat Surulangun dan menambah perekonomian masyarakat di kawasan *Onder Afdeling* Rawas. Bangsa Kolonial Belanda menerapkan sistem monopoli perdagangan yang menguntungkan mereka, jadi banyak masyarakat yang diwajibkan menjual barang hasil perkebunannya

kepada pemerintah kolonial Belanda. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat Surulangun juga adalah hasil dari gagasan orang-orang Belanda yang berdasarkan pandangan mereka tanaman tersebut laku di pasar internasional. Meskipun demikian perdagangan di Sungai Rawas juga terlihat hidup, karena masyarakat *Onder Afdeling* Rawas membutuhkan bahan yang tidak ada di daerahnya, begitu juga sebaliknya.

Perubahan sosial ekonomis yang terjadi di Surulangun, yang merupakan akar dari perkembangan desa pada masa selanjutnya adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh Kolonial Belanda pada dasawarsa kedua dan ketiga abad 19. Di daerah ini, masyarakat pedesaan dengan wilayah tertentu, kesatuan sosial yang terbentuk di bawah pengaruh kebijaksanaan yang dilaksanakan waktu itu, yaitu sistem pajak tanah. Di dalam masyarakat *Onder Afdeling* Rawas, muncullah suatu kelompok kecil dalam lingkungan masyarakat yang berpengaruh yang mendominasi kegiatan sosial dan ekonomis antar masyarakat lokal dalam berhubungan dengan dunia luar *Onder Afdeling* Rawas. Kelompok kecil dalam masyarakat lokal ini secara perlahan memperkuat posisi ekonomis mereka dan menjadi peka terhadap setiap kesempatan ekonomis seperti munculnya peluang bagi diperolehnya tambahan sumber-sumber pendapatan baru lewat pengusaha tanaman perdagangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah munculnya pengusaha tanaman perkebunan, maka suatu struktur birokrasi swasta mulai diterapkan di daerah ini. Hofland mengangkat penduduk pribumi untuk membantu mengatur sistem pemerintahan seperti Kawedanan, Marga dan lain-lainnya (Padmo, 2010).

Produk tanaman ekspor yang berhasil dikumpulkan itu, diharapkan akan dapat dikirimkan ke negeri induk yang kemudian dipasarkan di pasaran dunia secara luas baik di Eropa maupun Amerika. Pemasaran produksi tanaman ekspor di dunia itu akan mendatangkan keuntungan besar baik kepada pemerintah maupun para pengusaha di Negeri Belanda, sehingga hutang negeri induk segera dibayar. Eksploitasi produksi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda diwujudkan dalam bentuk perkebunan negara. Sejak itulah Hindia Belanda memasuki masa sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*). Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui alat birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksanakan langsung dalam proses mobilisasi sumber perekonomian berupa tanah dan tenaga kerja. Sistem tanam paksa lebih mengutamakan peningkatan hasil produksi tanaman ekspor yang sangat laku di pasaran Eropa, untuk itu pemerintah kolonial

memperkenalkan tanaman ekspor kepada para petani di Hindia Belanda (Maslahah & Hidayat, 2016).

Simpulan

Keruntuhan Kesultanan Palembang Darusalam oleh Kolonial Belanda banyak merubah tananan kehidupan di masyarakat Sumatera bagian Selatan. Bangsa Kolonial Belanda bukan hanya merubah status Kesultanan menjadi Karesidenan Palembang, namun juga memasukan unsur-unsur kepentingan politik yang menguntungkan pihak Belanda. Kejatuhan Kesultanan Palembang berarti kejatuhan seluruh wilayah kekuasaannya yang diambil alih oleh Kolonial Belanda. Surulangun yang sebelumnya hanya daerah pinggiran dan jauh dari pusat pemerintahan menjadi ibukota *Onder Afdeling* Rawas. Tentu banyak faktor yang menyebabkan pemerintah Kolonial Belanda melakukan demikian, salah satunya adalah sosial ekonomi yang mendukung pemerintahan Kolonial Belanda.

Masuknya Belanda di Surulangun dan meningkatkan statusnya menjadi ibukota *Onder Afdeling* Rawas membawa dampak yang besar, dimana banyak pendatang baru yang muncul, kota mulai ramai dan tanaman yang laku di pasaran internasional mulai dikenalkan oleh Belanda. Dalam kehidupan sosial, banyak budaya Eropa mulai diperkenalkan kepada masyarakat lokal. Bangsa Belanda banyak mengembangkan budaya sektor perkebunan karet dan sawit untuk menopang sistem pemerintahannya. Sungai Rawas menjadi salah satu jalan yang sangat ramai untuk dikunjungi dalam berdagang. Jalur sungai Rawas memang menjadi jalan dalam perdagangan masuknya barang luar dan masyarakat juga dapat menjual barang hasil tanamannya dengan pedagang luar. Meskipun demikian pemerintah Kolonial Belanda juga menerapkan sistem monopoli perdagangan yang sangat memberatkan masyarakat *Onder Afdeling* Rawas.

Daftar Rujukan

- Agustinus, J. D. (2016). *Lima Pilar Kepemimpinan Di Abad 21*. Malang: Media Nusa Creative.
- Alian, S. (2012). *Metodologi Sejarah Dan Histiografi*. Palembang: Proyek SP4.
- Andrik, P. (2015). *Komunikasi Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Fanani, A. (2017). Identitas dan mobilitas sosial priyayi dalam novel para priyayi karya Umar Kayam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 42–51.

Agus Susilo, Sarkowi
Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Surulangun Pasca Menjadi ibukota *Onder Adeling*
Rawas Tahun 1901-1942

Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah.* (N. Notosusanto, Trans.). Jakarta: Yayasan Penerbit UI.

Karesidenan Palembang. (2019).

Kasman. (2019). *Wawancara tanggal 05 Maret 2019 Pukul 14.30 Wib*
Mengenai Bangsa Belanda memasuki Surulangun. Surulangun.

KBBI, T. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa.

Maslahah, W., & Hidayat, A. W. (2016). Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Jawa 1830-1870. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(02).

Padmo, S. (2010). *Bunga rampai sejarah sosial-ekonomi Indonesia.* Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya

Suwandi. (2010). *Sejarah Museum Subkoss Garuda Sriwijaya di Lubuklinggau.* Lubuklinggau.: Yayasan Subkoss Garuda Sriwijaya.

Suwandi. (2019). *Wawancara tanggal 04 Maret 2019 Pukul 15.00 Wib*
Mengenai Kehidupan di Surulangun setelah ditetapkan sebagai ibukota
Onder Afdeling Rawas. Palembang.

Widianto. (2017). *Peran Pemimpin Kepala Sekolah sebagai Solution Given di Sekolah.* Malang: Ilmu Pendidikan.